

**PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP
PDRB KABUPATEN TERTINGGAL DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

DIAN MUSTIKA

NIM. 12020113120003

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2017

PESETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Dian Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 12020113120003

Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP
PDRB KABUPATEN TERTINGGAL DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dosen Pembimbing : Arif Pujiyono, S.E., M.Si.

Semarang, 29 November 2017
Dosen Pembimbing



(Arif Pujiyono, S.E., M.Si.)
NIP. 19711222 199802 1 004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dian Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 12020113120003

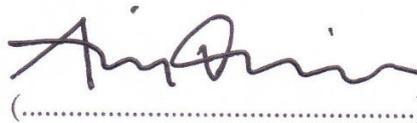
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP
PDRB KABUPATEN TERTINGGAL DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Desember 2017

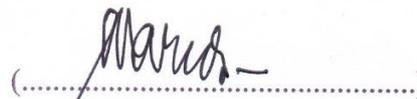
Tim Penguji

1. Arif Pujiyono, S.E., M.Si.



(.....)

2. Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D.



(.....)

3. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.



(.....)

Mengetahui,
Wakil Dekan I Akademik dan Kemahasiswaan



Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Dian Mustika, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat keseluruhan atau sebagian hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah tulisan hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 29 November 2017
Yang membuat pernyataan,



(Dian Mustika)
NIM. 12020113120003

ABSTRACT

Production process requires input such as capital and labor to produce output reference from Cobb-Douglas function. Infrastructure is form of capital and support tool to increase productivity of a region, in general, the econom called it as social overhead capital. Therefore, the availability of infrastructure is important to boost the economy. The availability of infrastructure in underdeveloped district of East Nusa Tenggara Province is still inadequate and not optimal.

The goal of this research is to analyze how big the infrastructure influanced the GDRP of 17 left behind regencies in East Nusa Tenggara Province since 2011 to 2015. The used data included GDRP to 2010 constant price, road lenght, quantity of sold electricity, elementary school, primary school, public health center, development spending. Data are processed by using regression analysis of panel data with random effect model metode.

The research results show quantity of sold electricity, elementary school and development spending give positive and significant influence to GDRP. The quantity of public health center give positive influence but not significant, while the quantity of primary school and road length give negative and not significant influence to GDRP. The quantity of elementary school and sold electricity have the biggest influence to GDRP of left behind regencies in East Nusa Tenggara Province.

Keywords : GDRP, infrastructure, left behind regencies, panel data regression

ABSTRAK

Proses produksi membutuhkan input berupa modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output yang sesuai dengan fungsi *Cobb-Douglas*. Infrastruktur merupakan salah satu modal dan sarana pendukung peningkatan produktivitas suatu daerah yang secara umum oleh ekonom pembangunan di sebut sebagai *social overhead capital*. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dinilai penting untuk mendorong perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kurang memadai dan belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh infrastruktur terhadap PDRB 17 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2015. Data yang digunakan meliputi PDRB atas harga konstan 2010, panjang jalan, jumlah listrik yang terjual, jumlah SD, jumlah SMP, jumlah puskesmas, dan pengeluaran pembangunan. Data diolah menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *random effect model*.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah listrik yang terjual, jumlah SD, dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Jumlah puskesmas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan panjang jalan dan jumlah SMP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Jumlah SD dan jumlah listrik yang terjual memiliki pengaruh paling besar terhadap PDRB kabupaten tertinggal di Povinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci : PDRB, infrastruktur, kabupaten tertinggal, regresi data panel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH INFRASTRUKTUR TEHADAP PDRB KABUPATEN TETINGGAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terimakasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Arif Pujiyono, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu dan waktunya untuk memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberikan doa, bimbingan, dan perhatian selama ini.
4. Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membeikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Seluruh staff BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan pelayanan dan waktunya dalam membalas *email-email* penulis sehingga data dalam skripsi ini lengkap dan dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Jaswardi dan Ibu Musniarti yang telah mendidik, membimbing, memberikan doa dan pengorbanan yang tak ternilai selama ini, kakak dan kedua adik penulis Joni Saputra, Ade Putra dan Nayla Oktavia yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.
7. Sahabat-sahabat penulis Puji Dwi Lestari, Nurul Fitria, Ari Nugroho, Sandy Hadisurya, Saula Fitria, Desti Marina dan Adinda Putri Hapsari yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka, yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis didalam penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan sesama bimbingan, Nur Wahidin, Nurul Septiyani, Nisarahmi, Luhur Jalu, Akbar dan Mbak Citra yang telah membantu, menjadi teman diskusi dan memberikan masukan selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman seperjuangan IESP 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tempat berbagi ilmu dan canda tawa selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Sukses untuk kita semua.
10. Adik-adik seperjuangan dari Solok, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKAMMI) yang menjadi keluarga kedua penulis dalam keadaan suka dan duka,

kebersamaan yang tercipta sebagai tempat penulis melepas rasa rindu akan suasana kampung halaman.

12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mungkin masih memiliki kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 29 November 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dian Mustika', with a stylized flourish extending from the end.

Dian Mustika
NIM. 12020113120003

DAFTAR ISI

	Halaman
PESETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1. 1. Daerah Tertinggal	14
2.1. 2. Infrastruktur	17
2.1. 3. Teori Pertumbuhan Solow-Swan	20
2.1. 4. Barang Publik.....	21
2.2. Hubungan Variabel Terikat terhadap Variabel Tidak Terikat	22
2.2.1. Hubungan Infrastruktur Ekonomi dengan PDRB	22
2.2.2. Hubungan Infrastruktur Sosial dengan PDRB.....	23
2.2.3. Hubungan Infrastruktur Administrasi (Pengeluaran Pembangunan) dengan PDRB.....	24
2.3. Penelitian Terdahulu	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	30
2.5. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel.....	32
3.1.1. Variabel Penelitian.....	32
3.1.2. Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2. Jenis dan Sumber Data	34
3.3. Metode Pengumpulan Data	34
3.4. Metode Analisis.....	35
3.4.1. Estimasi Model Regresi	38

3.4.2. Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model)	39
3.4.2.1. Chow Test.....	39
3.4.2.2. Hausman Test	40
3.4.3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	41
3.4.3.1. Uji Normalitas	41
3.4.3.2. Uji Multikolinieritas	42
3.4.3.3. Uji Autokorelasi	43
3.4.3.4. Uji Heteroskedastisitas	43
3.4.4. Uji Statistika.....	44
3.4.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)	44
3.4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (uji F)	45
3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1. Kondisi Geografis	47
4.1.2. Kondisi Infrastruktur.....	50
4.1.2.1. Infrastruktur Ekonomi	50
4.1.2.1.1. Jalan	50
4.1.2.1.2. Listrik.....	52
4.1.2.2. Infrastruktur Sosial	54
4.1.2.2.1. Jumlah Sekolah	54
4.1.2.2.2. Infrastruktur Puskesmas.....	57
4.1.2.3. Pengeluaran Pembangunan.....	58
4.1.3. Laju Pertumbuhan PDRB	60
4.2. Pemilihan Model Terbaik.....	61
4.3. Hasil Uji Penyimpangan Klasik	62
4.3.1. Normalitas.....	63
4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	64
4.3.3. Uji Autokorelasi.....	64
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.4. Hasil Uji Statistik analisis Regresi	66
4.4.1. Pengujian Signifikansi parameter Individual (Uji t).....	66
4.4.2. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	67
4.4.3. Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	68
4.5. Interpretasi Hasil.....	69
4.5.1. Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	70
4.5.2. Analisis Pengaruh Infrastruktur Sosial Terhadap PDRB Kabupaten Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	73
4.5.3. Analisis Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Kabupaten Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	77
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan.....	78

5.2. Keterbatasan	79
5.3. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen)....	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Panjang Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Persen).....	51
Tabel 4.2 Penjualan Listrik 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Kwh).....	53
Tabel 4.3 Jumlah SD 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Unit).....	55
Tabel 4.4 Jumlah SMP 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Unit).....	56
Tabel 4.5 Jumlah Puskesmas 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Unit)	57
Tabel 4.6 Pengeluaran Pembangunan yang Dianggarkan 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	59
Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 17 Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 (Persen).....	60
Tabel 4.8 Hasil <i>Chow Test</i>	62
Tabel 4.9 Hasil <i>Hausman Test</i>	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi (<i>Durbin-Watson</i>).....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Glejser</i>).....	66
Tabel 4.13 Hasil Estimasi Uji t	66
Tabel 4.14 Hasil Estimasi Uji F	67
Tabel 4.15 Hasil Estimasi Uji R ²	68
Tabel 4.16 Hasil Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model</i>).....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal di Indonesia	1
Gambar 1.2 Jumlah kabupaten Tertinggal menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015.....	2
Gambar 1.3 Rasio Eektrifikasi Indonesia Tahun 2015	7
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	48
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas (<i>Jarque-Bera</i>)	63
Gambar 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Variabel Penelitian.....	86
Lampiran B Data Variabel Perproduktivitas dalam Ln	91
Lampiran C Hasil <i>Chow Test</i>	96
Lampiran D Hasil <i>Hausman Test</i>	97
Lampiran E Hasil Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model</i>).....	98
Lampiran F Hasil Uji Normalitas	99
Lampiran G Hasil Uji Multikolinearitas	99
Lampiran H Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji <i>Glejser</i>)	100

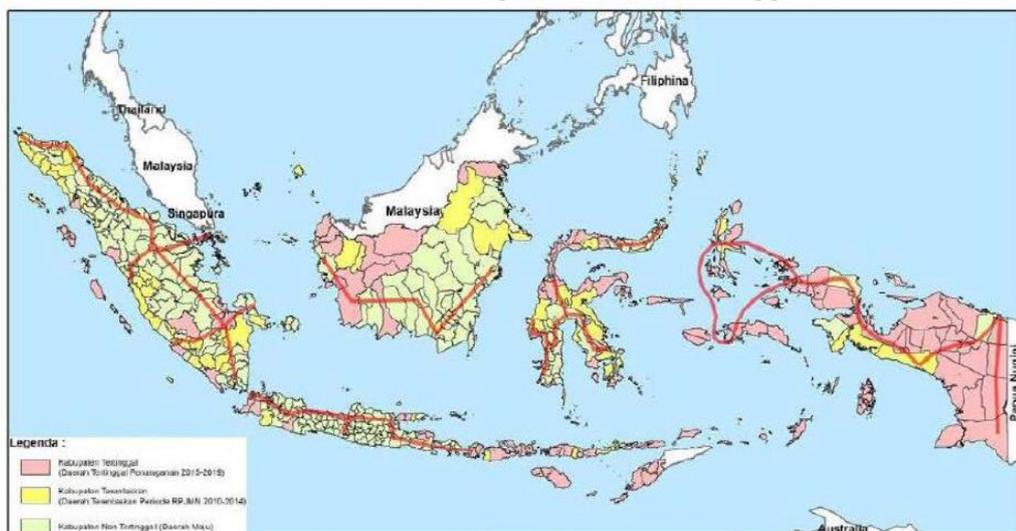
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2014). Daerah tertinggal terjadi akibat adanya kesenjangan antar daerah baik dari segi ekonomi, sosial dan pembangunan. Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antara wilayah mendukung adanya fakta mengenai kesenjangan antar daerah, sehingga menyebabkan beberapa daerah menjadi tertinggal.

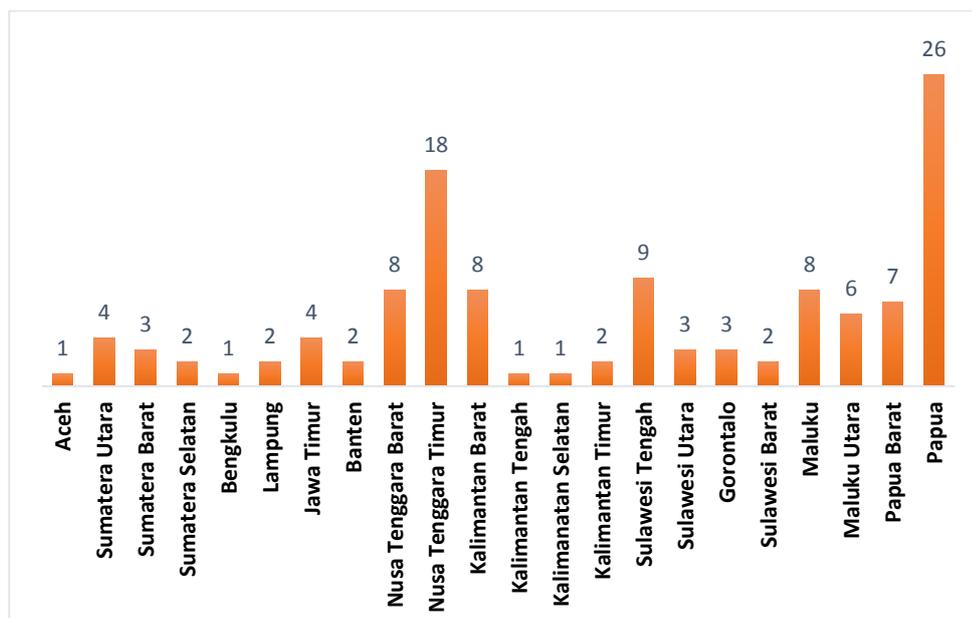
Gambar 1.1
Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal di Indonesia



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2014

Jika melihat peta persebaran daerah tertinggal berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, terdapat 122 kabupaten di wilayah Indonesia yang masih dikategorikan tertinggal. Penyebaran daerah tertinggal sendiri didominasi oleh wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) di mana dari 242 kabupaten/kota yang ada, terdapat 103 kabupaten/kota yang dikategorikan tertinggal, sedangkan untuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) dari 273 kabupaten/kota yang ada terdapat 19 kabupaten yang dikategorikan tertinggal.

Gambar 1.2
Jumlah Kabupaten Tertinggal menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2014, diolah

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah kabupaten tertinggal terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Papua sebanyak 26 Kabupaten dari total 29 kabupaten/kota, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 18

Kabupaten dari total 22 Kabupaten/kota yang ada. Jumlah kabupaten tertinggal paling sedikit adalah sebanyak 1 kabupaten yaitu Provinsi Aceh dari total 23 kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu dari 10 kabupaten/kota, Provinsi Kalimantan Tengah dari 14 Kabupaten/kota, dan provinsi Kalimantan Selatan dari total 13 kabupaten/kota.

Salah satu permasalahan daerah tertinggal yang paling dominan yaitu keterbatasan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dengan PDB mempunyai hubungan yang erat. Menurut Word Bank (dalam Prasetyo, 2008) elastisitas PDB terhadap infrastruktur adalah perubahan persentase pertumbuhan PDB per kapita sebagai akibat naiknya satu persen ketersediaan infrastruktur, diberbagai negara bervariasi antara 0,07 sampai dengan 0,44.

Tabel 1.1
Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen)

Wilayah/Pulau	2014	2015	2016	
			Trw III	Trw IV
1. Sumatera	23,02	22,18	21,98	22,02
2. Jawa	57,39	58,34	58,46	57,88
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,87	3,07	3,17	3,11
4. Kalimantan	8,77	8,15	7,73	8,27
5. Sulawesi	5,64	5,91	6,13	6,07
6. Maluku dan Papua	2,31	2,36	2,52	2,56
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, pembentukan PDB nasional masih didominasi oleh PDRB wilayah KBI. Wilayah Jawa masih mendominasi dalam pembentukan PDB

nasional di mana sampai triwulan IV tahun 2016 kontribusi wilayah Jawa sebesar 57,88 persen dan wilayah Sumatera berkontribusi sebesar 22,02 persen, sedangkan untuk wilayah lainnya hanya berkontribusi kurang dari 10 persen. Kontribusi paling sedikit adalah wilayah Maluku dan Papua sebesar 2,56 persen, diikuti wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,11 persen, padahal wilayah tersebut terutama Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar, namun belum dikelola secara optimal akibat terbatasnya infrastruktur yang ada.

Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2017). Untuk menghasilkan output (barang dan jasa) diperlukan input dalam proses produksi yaitu berupa modal dan tenaga kerja yang dijelaskan dalam teori pertumbuhan Solow-Swan yang didasarkan pada fungsi produksi *Cobb-Douglas*, di mana faktor produksi terdiri dari modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai faktor eksogen (Kuncoro, 2010).

Modal dalam hal ini dapat berupa barang faktor produksi, mesin, investasi, dan infrastruktur. Infrastruktur adalah istilah umum untuk beberapa kegiatan yang disebut sebagai "*social overhead capital*" oleh ekonom pembangunan seperti Paul Rosenstein Rodan, Ragnar Nurkes, dan Albert Hirschman. *Social overhead capital* merupakan barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan salah satu modal dalam proses produksi.

Berdasarkan World Bank Report, infrastruktur dibagi menjadi 3 golongan yaitu (The World Bank, 1994):

1. Infrastruktur ekonomi, meliputi *public utilities* (listrik, telekomunikasi, pasokan air ledeng, sanitasi pembuangan limbah), *public works* (jalan, bandungan, saluran irigasi, dan drainase), dan *other transport sector* (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan bandara).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi/instansi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang wilayahnya terdiri dari kurang lebih 550 pulau dan memiliki jumlah daerah tertinggal terbanyak kedua setelah Papua, di mana 18 kabupaten dikategorikan tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat daya, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Ende, Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Sabu Raijua.

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Provinsi NTT (Antasari, 2015). Ketersediaan beberapa infrastruktur berupa infrastruktur ekonomi (panjang jalan dan listrik), infrastruktur sosial (SD, SMP, dan puskesmas), dan infrastruktur administrasi (pengeluaran pembangunan) masih kurang optimal ketersediaan dan penyebarannya di Provinsi NTT.

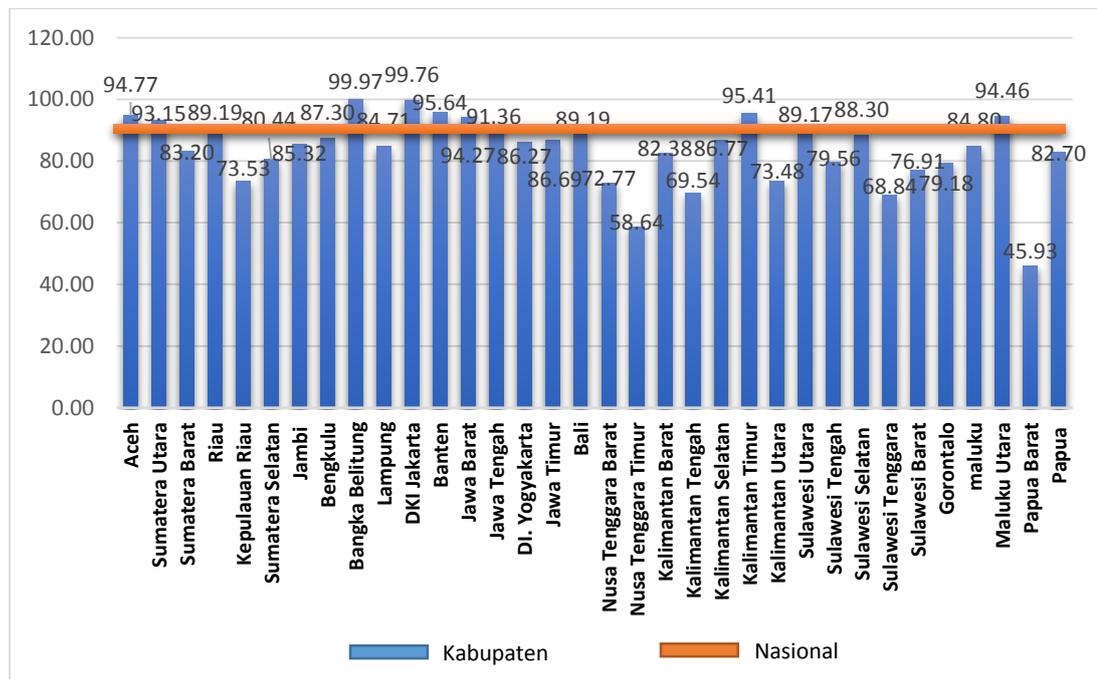
Infrastruktur ekonomi jalan sangat diperlukan oleh tiap daerah. Jalan adalah prasarana fisik, berfungsi untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dan berbagai pusat kegiatan sosial maupun ekonomi. Ketersediaan jalan di Provinsi NTT sampai saat ini belum optimal terutama kabupaten tertinggal. Berdasarkan data BPS, tiap kabupaten tertinggal sekitar ± 42 persen dari total jalan dalam keadaan rusak. Jika dilihat menurut wewenangnya, sekitar 39 persen jalan provinsi masih dalam keadaan rusak dan 61 persen dalam keadaan baik tahun 2015 (BPS Provinsi NTT, 2016), sedangkan jalan negara sekitar 98 persen dalam kondisi mantap/baik (Dinas Perhubungan Provinsi NTT), dan berdasarkan data tersebut kondisi jalan yang paling banyak rusak yaitu rata-rata jalan kabupaten.

Selain jalan, infrastruktur yang sangat berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat adalah listrik. Listrik merupakan sumber energi yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (terutama proses produksi), sosial maupun pemerintahan. Ketersediaan tenaga listrik tiap tahunnya harus diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada.

Berdasarkan Gambar 1.3, rasio elektrifikasi di Provinsi NTT tahun 2015 masih berada di bawah rasio nasional (88,30 persen) yaitu hanya sebesar 58,64 persen. Rasio elektrifikasi di Provinsi NTT terendah kedua setelah Provinsi Papua yaitu sebesar 45,93 persen. Rendahnya rasio elektrifikasi di provinsi NTT menunjukkan masih rendahnya rumah tangga yang sudah menggunakan listrik. Jika melihat jenis bahan bakar untuk penerangan rumah, masih banyak rumah

tangga di provinsi NTT yang menggunakan sumber penerangan pelita atau obor akibat terbatasnya pasokan listrik. Terbatasnya pasokan listrik di Provinsi NTT menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir antar daerah yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya (Bappenas, 2015).

Gambar 1.3
Rasio Eletrifikasi Indonesia Tahun 2015



Sumber: Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2015, diolah

Penelitian Suyanto (2013) menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal dan non tertinggal di Indonesia tahun 2009-2011. Terjadinya peningkatan penjualan listrik berarti semakin banyak masyarakat menggunakan listrik, sehingga kegiatan ekonomi terutama produksi juga akan semakin meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan PDRB daerah.

Salah satu modal ekonomi yang paling penting yaitu sumber daya manusia, maka dari itu pembangunan manusia melalui pendidikan sangat perlu dilakukan terutama untuk kabupaten tertinggal. Keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah salah satunya dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah. Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk NTT mencapai 6,99 tahun, di mana artinya penduduk Provinsi NTT rata-rata bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 SMP (BPS Provinsi NTT, 2016).

Keberhasilan pembangunan manusia di Provinsi NTT melalui pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana pendidikan yang ada. Ketersediaan sarana pendidikan terutama pendidikan dasar (SD dan SMP) di Provinsi NTT tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun ada beberapa kabupaten tertinggal yang mengalami penurunan jumlah SD dan SMP yaitu Kabupaten Belu, Ende, Nagekeo, dan Timur Tengah Selatan. Meskipun jumlah sekolah tiap tahun cenderung meningkat, namun akses terhadap sekolah di beberapa kabupaten tertinggal masih rendah, akibat penyebaran sekolah belum merata di tiap daerah terutama daerah yang terpencil di Provinsi NTT.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti penelitian Zamzami dan Pujiyono (2014) yang menjelaskan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Penelitian Sari (2009) juga menunjukkan hasil yang serupa di mana jumlah sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB untuk 25 kabupaten tertinggal di Kawasan Timur Indonesia.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan modal penting untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana semakin sehat seseorang maka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Keberadaan fasilitas kesehatan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan untuk berobat. Menurut statistik kesehatan Provinsi NTT tahun 2015, fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat yaitu puskesmas atau puskesmas pembantu sebanyak 60,75% dan sisanya mengunjungi fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit, praktek dokter, klinik, praktek pengobatan tradisional.

WHO mensyaratkan ketersediaan puskesmas adalah satu puskesmas untuk melayani 30.000 penduduk. Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan menurut Dinas Kesehatan Provinsi NTT berjumlah 385 dengan jumlah penduduk 5,12 juta orang, secara rata-rata satu puskesmas dapat melayani 13.299 penduduk, sehingga memenuhi standar rasio ketersediaan puskesmas dari WHO (BPS Provinsi NTT, 2015). Meskipun rasio ketersediaan puskesmas telah terpenuhi, namun penyebaran puskesmas masih belum merata terutama daerah-daerah terpencil di Kabupaten tertinggal.

Hasil penelitian Pranessy, dkk (2012) menunjukkan bahwa jumlah puskesmas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dengan tingkat elastisitas yang paling besar dibandingkan variabel lain di dalam penelitian tersebut. Pembangunan dibidang kesehatan sangat mempengaruhi output yang dihasilkan, di mana semakin sehat seseorang maka akan meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja akibat akses fasilitas kesehatan terjangkau.

Masih banyaknya kabupaten tertinggal terutama di wilayah provinsi NTT akibat keterbatasan infrastruktur yang ada inilah menjadi salah satu fokus pada era kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kala periode 2015-2019 yaitu mempercepat pembangunan terutama di wilayah Kawasan Timur Indonesia yang dirumuskan didalam Nawacita. Salah satu isi Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan agar dapat mengurangi ketimpangan antar daerah. Pembangunan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan manusia seperti jalan, bangunan sekolah, kesehatan dan lainnya agar dapat mengurangi kesenjangan.

1.2. Rumusan Masalah

Daerah tertinggal di Provinsi NTT ada 18 kabupaten, paling banyak kedua setelah Provinsi Papua yaitu 26 Kabupaten. Ketersediaan jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas umum dan ekonomi tersedia belum dalam kondisi optimal, di mana \pm 42 persen total panjang jalan masih dalam keadaan rusak, rata-rata jalan yang paling banyak rusak yaitu jalan kabupaten.

Ketersediaan listrik juga belum optimal, di mana dilihat dari rasio elektrifikasi masih di bawah nasional dan termasuk paling rendah setelah Provinsi Papua, yang menerangkan bahwa masih rendahnya akses rumah tangga terhadap listrik di Provinsi NTT. Kualitas sumber daya masyarakat Provinsi NTT juga dikatakan masih rendah yang terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun masih didominasi oleh tamatan SD akibat ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pendidikan belum optimal. Penyebaran jumlah

puskesmas belum merata di tiap daerah, meskipun jumlah puskesmas di Provinsi NTT sudah memenuhi standar WHO. Ketersediaan infrastruktur yang belum optimal ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat terutama produksi yang dapat mempengaruhi PDRB tiap kabupaten tertinggal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur ekonomi (panjang jalan dan listrik), infrastruktur sosial (SD, SMP, dan puskesmas) dan infrastruktur administrasi (pengeluaran pembangunan) terhadap terhadap PDRB kabupaten tertinggal di Provinsi NTT ?
2. Infrastruktur manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kabupaten tertinggal di Provinsi NTT ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi (panjang jalan dan listrik) infrastruktur sosial (SD, SMP, dan puskesmas) dan infrastruktur administrasi (pengeluaran pembangunan) terhadap PDRB kabupaten tertinggal di Provinsi NTT.
2. Mengetahui infrastruktur manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan yang terkait permasalahan infrastruktur terutama masalah kondisi dan ketersediaan infrastruktur untuk kabupaten tertinggal di Nusa Tenggara Timur agar dapat meningkatkan PDRB kabupaten tersebut.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian pengaruh infrastruktur terhadap PDRB dan menambah wawasan pengetahuan terutama bidang ekonomi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar teoritis penelitian ini meliputi teori pertumbuhan Solow-Swan, teori infrastruktur, teori barang publik. Pada bab ini juga dibahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan variabel penelitian berupa definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, keterbatasan serta beberapa saran yang membangun untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.